

Data Perlu Disampaikan ke Masyarakat

MAGELANG (KR) - Masalah data tidak perlu ditakuti. Kalau suatu data memang perlu disampaikan kepada masyarakat, harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga benar-benar dapat membantu, baik mengenai kemiskinan, pengangguran, kesehatan, anak-anak sekolah maupun lainnya. "Harus kita sampaikan, supaya kita lebih berhati-hati," kata Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH kepada wartawan usai memberikan pengarahan di Forum Satu Data Kota Magelang yang dilaksanakan di Ruang Adipura Kencana kompleks Kantor Walikota Magelang, Rabu (16/11).

"Kecuali data-data yang rahasia, kita memang tidak boleh," tambah Walikota Magelang didampingi Wakil Walikota Magelang Drs KHM Mansyur MAG, Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang M Abdul Azis SH maupun lainnya. Di forum ini juga disampaikan paparan Kepala Bappeda Kota Magelang. Walikota Magelang berharap, agar datanya nanti dapat semakin kompak dengan dilaksanakan kegiatan ini, serta dapat lebih valid dan dapat menjadi informasi yang lebih bagus.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk mendukung Satu Data Indonesia dengan mewujudkan Satu Data Kota Magelang. Satu Data Indonesia merupakan isu strategis yang harus diwujudkan sampai dengan level wilayah terkecil untuk mencapai pembangunan berbasis data yang tepat sasaran. Diharapkan seluruh stakeholder Kota Magelang semakin kompak sehingga data yang disajikan lebih valid, sehingga menjadi informasi yang bagus. "Kalau datanya nggak valid, nanti informasinya juga salah," ucap Dokter Aziz.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Magelang M Abdul Azis menerangkan, sampai saat ini Kota Magelang telah memiliki 60 produsen data yang tidak hanya berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun juga dari luar OPD. Pada tahun 2022, implementasi Satu Data telah dievaluasi oleh Pemprov Jateng. (Tha)-f

Bawaslus Klaten Tangkal Hoaks dan Politisasi SARA

KLATEN (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif, di salah satu hotel di Klaten, Rabu (16/11). Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Klaten Muh Milkhan mengemukakan, sosialisasi bertema bekal menangkal hoaks dan politisasi SARA dalam Pemilu serentak 2024 tersebut, menghadirkan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Milkhan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bawaslus, yakni pengawasan sosialisasi partisipatif. Sebelumnya juga telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi untuk kawula muda, terkait meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengawasan partisipatif. "Kita menasar beberapa lapisan masyarakat. Ini perwakilan dari berbagai macam agama dan teman-teman yang ada di literasi digital Klaten juga. Kita berikan pengetahuan dan bekal dalam menangkal isu-isu hoaks dan isu politisasi sara. Semoga di Klaten, untuk dua hal itu khususnya, dan tentunya juga untuk politik yang bisa lebih diminimalisir atau dihilangkan," kata Milkhan.

Menurut Muh Milkhan, selama ini hoaks dan isu SARA di Klaten belum terlalu besar. Bawaslus saat ini sedang menyusun indeks kerawanan Pemilu (IKP), koordinasi dengan berbagai macam stakeholder untuk mencari tingkat kerawanan, khususnya terkait hoaks dan isu SARA.

"Hoaks dan politisasi SARA Selama ini memang tidak terlalu besar. Tidak lama lagi nanti kita juga akan ada launching IKP secara nasional. Kita lihat identifikasinya di IKP itu nanti. Klaten kemarin termasuk yang kondusif, kalau dilihat dari IKP sebelumnya. Ini juga menjadi warning bagi kita semua, untuk melakukan perbaikan dari kendala-kendala sebelumnya. Khususnya untuk politik uang, hoaks dan politisasi SARA," jelas Muh. Milkhan.

Kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif tersebut menghadirkan narasumber, Purnawan Kristanto, pegiat media sosial di Klaten, dan Agus Wedi, redaktur Islam Santun dari UIN Surakarta. (Sit)-f

BUMD Boyolali Gelar Gebyar Undian Simpanan 2022

BOYOLALI (KR) - Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Boyolali, PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) menyelenggarakan acara Gebyar Undian Simpanan Tahun 2022. Acara digelar di Gedung Cendana Boyolali pada hari Rabu (16/11/2022). Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

Penyelenggaraan undian ini dilakukan bagi nasabah dengan jenis tabungan antara lain, Tahara, Tamades, Tamapel, Tabunganku, Tabungan Umroh, Tabungan Kurban, Tabungan Simpel dan Tabungan Deposito dengan hadiah utama berupa satu unit mobil Honda Brio. Selain itu ada juga hadiah-hadiah lain seperti dua unit sepeda motor Honda Beat, dua unit sepeda motor Honda Revo, 18 unit televisi LED, 18 unit sepeda gunung, 18 unit lemari pendingin, 18 unit blender, 18 unit kipas angin, 18 unit kompor gas dan 18 unit alat penanak nasi.

Direktur Utama PT BPR BKK Boyolali (Perseroda), Kuwat Wiyono mengatakan pihaknya akan terus melakukan pelayanan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah di perusahaannya. PT BPR BKK mendapatkan dana UMKM oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali. "Tahun 2022 PT BPR BKK Boyolali mendapatkan dana UMKM dari pemerintah daerah sebesar Rp 2 miliar gratis tanpa bunga. Oleh pemerintah daerah menetapkan dan harus dilaksanakan oleh PT BPR BKK, dana itu disampaikan kepada para pelaku UMKM dengan suku bunga 0,5 persen sehingga sangat murah," ujarnya. (R-3)-f



KR-Mulyawan
Pengundian Gebyar Hadiah disaksikan pihak kepolisian dan notaris.

DELEGASI MANCANEGARA APRESIASI BUDAYA KRATON

WPF Diharap Jadi Harapan Damai Masa Depan

SOLO (KR) - Filosofi perdamaian dunia cocok diterapkan di ranah budaya Jawa yang mengedepankan harmoni, keselarasan dan perdamaian. Karenanya harapan agar World Peace Forum (WPF) menjadi secercah harapan bagi banyak pihak di tengah proyeksi masa depan global yang suram dan rentan dengan banyak krisis. Mulai dari krisis pangan, energi dan krisis kepercayaan antara sesama komunitas global.

"Semoga, WPF ini sebagai penegasan selalu ada secercah harapan masa depan damai bagi kita semua dan juga untuk anak cucu kita di masa depan," tandas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberi sambutan dala Welcome Dinner World Peace Forum di Sasana Handrawina Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Rabu 16/11)

malam. Di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mereka diterima Kanjeng Ratu Paku Buwono serta putra mahkota Kraton Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram (KGPAA Hamengku Negara).

Sebagaimana diketahui, sebelum WPF ke-8 digelar di Hotel Sunan 17-18 November, diselenggarakan welcome dinner di Kraton Kasunanan. Sebanyak 70 orang dari Indonesia dan 20 negara dari 5 benua di Indonesia akan mengikuti Forum Perdamaian Dunia ke-8 yang diprakarsai Center for Dialogue and Cooperation among Civilization) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Solo dan The Cheng Ho Multiculture Education Trust di Kuala Lumpur pimpinan Tan Sri Lee Kim Yew. Dalam pertem-

muan yang di antaranya juga dihadiri Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Vice President of the G-20 Interfaith Association Dr Katherina Marshall, Vatican's Pontifical Council for Interreligious Dialogue Rev Laurent Basanese dan lainnya.

Bambang Soesatyo mengemukakan harapan semua pihak forum ini menjadi penyejuk hati dari eskalasi kewenangan global dan konflik antarnegara.

"Juga mampu menggugah kesadaran kolektif global menuju tatanan dunia yang harmonis dan berkeadilan," kata Bambang Soesatyo. Ketua DPR RI juga berharap para delegasi WPF bisa berwisata menikmati keindahan Solo.

Para tamu tampak menikmati gelar tari Serimpi Gondokusumo yang diiringi gamelan pusaka Kiai Lokananta. Para tamu mancaneg-

ara selain mengapresiasi seni budaya juga seni kuliner, a suguhan khas Kraton Surakarta. Di antaranya kunir asem, sup tiga rasa, Bestik Galantin, Nasi Gunung Sari, Sate Pentil, Dendeng Age dan Cake Puding Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan 'Surakarta Message' yang akan menjadi output WPF ini bisa dimaknai sebagai pesan bersama mengenai persaudaraan dan perdamaian. Pe-

san ini dibuat para delegasi World Peace Forum ke 8 yang berasal dari lintas negara dari negara-negara di dunia.



KR-Istimewa
Serah terima souvenir antara Din Syamsuddin dan Kanjeng Ratu Pakubuwana.

Pencairan Bantuan Rehab RTLH 2022 Dibatalkan

PURWOREJO (KR) - Pencairan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 dibatalkan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo mengeluarkan surat tentang kendala yang dihadapi dalam proses administrasi hingga mengakibatkan bantuan tidak dapat direalisasi.

Padahal, 398 penerima bantuan di 41 desa dan kelurahan di Purworejo mulai merealisasikan rehab rumah mereka. Bahkan, proses pembangunan ada yang sudah mencapai 75 persen. "Untuk Desa Kalisemo ada sepuluh keluarga miskin yang menerima bantuan rehab RTLH. Seluruhnya sudah menerima material bahan bangunan dari toko dan merealisasikan program," ungkap Kepala Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Sarimo, Rabu (16/11).

Menurutnya, adanya pembatal-

an tersebut akan menyebabkan keresahan karena penerima akan dituntut membayar bahan material yang sudah dikirimkan toko bangunan senilai Rp 15 juta per penerima itu akan dibayarkan pemerintah melalui bank yang ditunjuk. "Kalau ada pembatalan begini, siapa yang harus bertanggungjawab. Toko sudah kontak dengan kami menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan," tuturnya.

Kades Kalimiru Kecamatan

Bayan Agung Yuli Priatmoko menuturkan, sebanyak sepuluh keluarga penerima bantuan rehab RTLH. Pekerjaan rehab sedang berlangsung, bahkan sudah ada yang selesai 100 persen. Warga penerima bantuan mengadu kepada pemerintah desa terkait pembatalan tersebut.

"Prinsipnya kami menindaklanjuti apa yang jadi keresahan warga penerima bantuan rehab RTLH. Sebab, berdasarkan informasi, semua proses sudah dilalui, tapi tiba-tiba ada surat yang jika ditelaah isinya tentang pembatalan pencairan," ucapnya.

Agung berharap pemerintah bisa mengurai persoalan tersebut dan mencari solusi pembatalan program. Sebab untuk program RTLH, masyarakat mengikuti apa yang diperintahkan dinas terkait.

Melihat potensi masalah sosial akibat pembatalan itu, Paguyuban Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Purworejo (Polosoro) mengirimkan permohonan audiensi dengan Bupati Purworejo. Ketua Polosoro Suwanto mengatakan, surat permohonan itu tinggal menunggu jawaban dari bupati. "Kami bermaksud melakukan klarifikasi dan meminta solusi terbaik untuk persoalan bantuan RTLH," tegasnya.

Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo Eko Paskiyanto mengemukakan, bantuan rehab RTLH tidak dapat dicairkan karena terkendala mekanisme. Kendati demikian, kebijakan itu merupakan kesimpulan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purworejo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Purworejo. (Jas)-f

PGN Bangun Infrastruktur Gas Bumi KIT Batang

BATANG (KR) - Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk, mulai bangun infrastruktur gas bumi menuju Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pembangunan ini merupakan eksekusi konkret PGN dalam menyediakan energi bersih bagi kawasan industri dan mendukung utilisasi Pipa Transmisi Cirebon-Semarang yang dibangun oleh pemerintah.

Jaringan pipa distribusi ke KIT Batang yang akan dibangun berdiameter 8 inch sepanjang 7,3 Km. Dengan tekanan 17 Barg, kapasitas alir dari pipa ini sebesar 25 MMSCFD. KIT Batang berpotensi menyerap gas bumi maksimal 24,8 MMSCFD yang terdiri dari 14 tenant. Saat jaringan pipa gas bumi beserta infrastruktur pendukung nantinya siap on stream pada 2023, gas bumi untuk KIT Batang akan bersum-

ber dari PEPC Jambaran Tiung Biru (JTJB).

PGN mulai melaksanakan First Welding atau pengelasan pertama infrastruktur distribusi gas bumi KIT Batang yang dilakukan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar, Rabu, (16/11). Kegiatan dihadiri oleh Asisten Deputi Energi Minyak & Gas Kementerian BUMN, Abdi Mustakim, Perwakilan Kementerian ESDM Agung Kuswar-

dono, Kadis ESDM Pemprov Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Batang Wilopo, Kapolres Batang AKBP M. Irwan Susanto, Direktur Utama Kawasan Industri Terpadu Batang Ngurah Wirawan, Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Ahmad Fauzie Nur, Direktur Strategis HCM PT PP Sinur Linda Gustina, beserta jajaran lainnya. (Cha)-f



KR-Chandra AN
Penyambungan pipa dengan las menandai dibangunnya infrastruktur gas bumi di KIT Batang.

Klaten Percontohan Nasional Inovatif Bentuk PKUB Desa

KLATEN (KR) - Kabupaten Klaten menjadi pionir di tingkat nasional, sebagai daerah yang telah memiliki Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di 401 desa/kerurahan. PKUB se-Kabupaten Klaten tersebut dikukuhkan Rabu (16/11/2022) di Stadion Trikoyo, oleh Bupati Klaten Sri Mulyani.

Sri Mulyani memberikan apresiasi tinggi pada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Klaten yang telah berhasil membentuk PKUB di seluruh desa/kerurahan tersebut. "Para tokoh agama memiliki peran besar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Toleransi, saling menghormati dan menghargai dalam mengamal-

kan ajaran agamanya," kata Bupati.

Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia (AFKUBI) Ida Pangelingsir Agung Sukahet mengemukakan, Klaten menjadi daerah pertama yang mengukuhkan PKUB di seluruh wilayah desa. PKUB desa/kerurahan ini menjadi percontohan tingkat nasional, dan sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama. "PKUB menjadi forum yang langsung menjangkau masyarakat dan sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Keberadaan PKUB ini menunjukkan bahwa Klaten bukan hanya indah secara fisik, namun juga hubungan antar umat

beragama yang berjalan harmonis," kata Ida Pangelingsir.

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga mendorong daerah lain mengikuti Klaten, untuk segera membentuk forum KUB di tingkat kecamatan hingga desa/kerurahan. Ia menjelaskan keberadaan forum ini menjadi penting di tengah keragaman masyarakat saat ini, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan masyarakat.

"Ada 4.544 pengurus (PKUB) yang dikukuhkan, ini hebat, ini adalah pelopor. Dan semestinya segera diikuti oleh seluruh kabupaten/kota dan provinsi (untuk membentuk PKUB). Saya sangat mengapresiasi kolaborasi

pemerintah daerah, TNI/Polri, FKUB di Kabupaten Klaten yang sudah berhasil dan menjadi pionir membentuk PKUB di seluruh wilayah desa," jelas Ida Pangelingsir.

Staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad juga memberi-

kan apresiasi pembentukan dan pengukuhan PKUB 401 desa/kerurahan di Klaten tersebut. Menurutnya, kerukunan umat beragama tidak dapat berjalan tanpa komitmen dan dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran daerah. (Sit)-f



KR-Sri Warsiti
Sri Mulyani menerima penghargaan, sebagai bupati paling peduli dan inovatif membangun kerukunan umat beragama.